

TRANSISI MASYARAKAT AGRARIS MENUJU MASYARAKAT INDUSTRIAL INDONESIA

Barnabas Ratuwalu

Fakultas Engineering, Departemen Industrial Engineering, Universitas Presiden

Jl. Ki Hajar Dewantara

Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi - Indonesia 17550

Email: hironimusratuwalu@president.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat itu dinamis. Begitu pula kegiatan ekonominya. Untuk sementara waktu kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia umumnya berciri agraris. Namun suatu dinamika sedang berlangsung menuju masyarakat industrial. Tanda-tanda ke arah itu ialah Industri-industri nasional dan internasional yang berpusat di kota perlahan-lahan mulai memperkecil luas lahan pertanian. Industri-industri membutuhkan tenaga kerja. Dan para pekerja membutuhkan rumah, maka lahan pertanian semakin dikurangi lagi. Para petani tua yang hidup di desa juga mulai beralih profesi karena lahan semakin sempit, anomali cuaca, gagal panen, serangan hama dan daya tawar lemah atas hasil panen. Regenerasi petani pun mandeg karena 90an % anak muda usia produktif 15-23 tahun lebih tertarik mengadu nasib di kota. Apalagi arah kebijakan pendidikan nasional ke depan lebih tertuju pada pendidikan vokasi dan vokasi plus untuk siap kerja di dunia industri. Pada tahun 2030 70 % penduduk Indonesia memadati kota-kota. Maka transisi masyarakat agraris menuju masyarakat industrialis akan terjadi pada sekitar tahun itu, tahun ledakan penduduk usia produktif Indonesia. Perilaku kaum muda pada saat itu juga akan beralih ke lebih rasional, analitis, linear, individual, dan sekular yang bisa mengambil jarak dari pertimbangan etis dan spiritual yang agak bertolak belakang dengan pandangan masyarakat agraris sebelumnya yang berciri siklis, holistik, emosioal, sosial, etis dan spiritual atas sektor ekonomi.

Kata kunci: ledakan usia produktif, 70 % penduduk urban, pendidikan vokasi plus, perubahan cara berpikir dan berperasaan, kurang pertimbangan etis dan spiritual

1. PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan artikel ini ialah kenyataan bahwa Indonesia akan mengalami ledakan generasi produktif kaum muda pada tahun 2035. Apa mata pencaharian utama mereka? Apakah mereka akan mempertahankan dan mungkin meningkatkan kualitas status ekonomi masyarakat Indonesia sebagai masyarakat agraris? Data menunjukkan bahwa diperkirakan di pedesaan tinggal 4 % anak muda usia 15-23 yang tertarik pada pertanian. Hampir semua anak muda di desa lebih memilih mengadu nasib di sektor industri, industri UMKM atau sektor informal kota. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa bertani simbol kemiskinan, keterbelakangan dan kesengsaraan. Mereka kurang bersemangat bekerja di bawah terik panas matahari, sementara hasil yang diperoleh adalah kesengsaraan. Masyarakat industrial dan masyarakat teknologi informatif di kota menjadi sasaran orientasi hidup mereka. Karena masyarakat kota adalah simbol kekayaan, modernitas dan kebahagiaan.

Bukan hanya itu di sejumlah daerah jumlah petani tua yang berganti mata pencaharian lebih banyak dari jumlah anak muda yang berminat pada pertanian. Alasannya macam-macam: anomali cuaca karena ulah industri, konversi lahan pertanian ke lahan industri, serangan hama, gagal panen, dan posisi bargaining yang lemah (Kompas, Senin, 18 September 2017, hal. 6). Urbanisasi adalah salah faktor penentu industrialisasi. Pada tahun 2030 sekitar 70 % penduduk Indonesia akan berpadat-padatan tinggal di kota. Itu berarti bahwa pada tahun-tahun puncak ledakan generasi muda warna ekonomi sudah bertransisi dari ekonomi agraris ke ekonomi industrialis.

Indikasi lain yang mengarah pada transisi ekonomi agraris ialah peluang masuknya investasi asing yang besar. Pada tanggal 19 Mei 2017 Indonesia berhasil meraih peringkat *Negara Layak Investasi* dari lembaga pemeringkat internasional S&P. Peringkat utang pemerintah Indonesia naik ke BBB-. Ini suatu prestasi yang cukup berdampak karena mencerminkan utang pemerintah yang risikonya lebih aman bagi investor. Akibatnya, biaya bunga utang akan turun, sehingga meringankan beban anggaran pemerintah. Peringkat utang badan usaha milik negara atau swasta juga akan ikut turun,

dan dari situ akan ada harapan baru untuk membantu pemulihan ekonomi kita. Sebaliknya, investor global, yang sering hanya dapat membeli utang atau obligasi yang berada di peringkat zona “layak investasi”, sinyal baru ini juga penting (Tempo.co, Senin 29 Mei 2017).

Para ekonom melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk bangkit memulihkan kedaulatan ekonomi setelah diterpa krisis moneter 20 tahun silam. Pemerintahan Jokowi berharap dengan perolehan status ini para investor berdatangan untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan membantu pemerintah untuk mewujudkan salah satu dari Trilogi Pembangunan, yakni *Ekonomi yang mandiri*.

Muncul pertanyaan ialah apakah dana yang diperkirakan jumlahnya sangat besar itu akan memberi isyarat keadaan ekonomi Indonesia yang lebih bergantung pada bangsa lain daripada kemandiriannya dan pada gilirannya menguasai ekonomi kita? Ekonomi tidak terlepas dari bidang politik. Butir kedua Trilogi Pembangunan pemerintahan Jokowi ialah *Politik yang berdaulat*. Tidakkah arus deras investasi asing itu memberi sinyal akan intervensi politik negara-negara lain terhadap politik Indonesia? Dan terakhir ekonomi tidak terlepas dari kebudayaan. Butir ketiga Trilogi Pembangunan pemerintahan Jokowi ialah *Kebudayaan yang berkarakter*. Salah satu wujud budaya ialah wujud material. Dan salah satu komponen wujud material ialah mata pencaharian masyarakat. Apa yang menjadi karakteristik mata pencaharian masyarakat Indonesia? Untuk sementara ciri khas mata pencaharian masyarakat Indonesia ialah *Agraris*. Apakah kedatangan arus besar investasi itu akan pelan-pelan mengubah karakter budaya pertanian masyarakat menjadi budaya *industrial*? Lebih jauh lagi apakah karakter material itu akan ikut menggeser karakter moral dan spiritual masyarakat?

2. METODE PENELITIAN

Data yang dipakai untuk tulisan ini diambil dari buku-buku dan koran-koran. Jadi metode penelitian ini berciri literatur. Data-data itu bersifat kualitatif karena merupakan abstraksi dari penelitian-penelitian kuantitatif dan juga karena menyentuh bidang pembahasan yang luas. Bidang yang ditelaah berupa peralihan sebuah paradigma mata pencaharian masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris menuju masyarakat industrial yang berhubungan dengan pola pikir, perasaan, politik, kultural, etis dan spiritual.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. DEFINISI

Masyarakat agraris adalah sebuah masyarakat yang ekonominya didasarkan pada produksi dan pemeliharaan tanaman dan tanah pertanian. Cara lain untuk mendefinisikan sebuah masyarakat agraris ialah dengan melihat seberapa besar produksi total suatu bangsa dalam budaya pertanian.

Masyarakat industrial mengacu pada sebuah masyarakat yang didorong oleh penggunaan teknologi untuk memproduksi barang dalam jumlah besar di pabrik-pabrik. Kemampuan produksi ini terjadi karena penemuan sumber-sumber energi eksternal, misalnya bahan-bahan bakar fosil dan listrik. Salah satu faktor utama industrialisasi ialah urbanisasi. Urbanisasi melahirkan direrensiasi pekerjaan yang semakin luas. Orang semakin spesialis.

Transisi masyarakat agraris ke masyarakat industrial terjadi manakala kurang dari setengah penduduknya secara langsung terlibat dalam produksi agrikultural. Tentu perhitungannya bukan secara matematis ketat seperti perhitungan suara pemilu 50 % + 1 orang. Artinya 50 % + 1 orang sudah memproduksi sebagai industriawan/i atau pengusaha. Atau sebaliknya 50 % - 1 orang berprofesi sebagai petani, peternak atau nelayan. Tetapi secara longgar dikatakan bahwa lebih dari 50 % rakyat sudah beralih dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial.

3.2. PERAN PEMERINTAH

3.2.1. Peran Eksekutif

Peralihan karakteristik ekonomi dan kebudayaan material masyarakat sangat ditentukan oleh pola kebijakan yang dirancang dalam jangka pendek, menengah dan panjang (RPJMN dan RPJPN) dari pihak eksekutif. Eksekutif adalah salah pihak yang bisa menentukan transisi masyarakat agraris ke masyarakat industrial Indonesia. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto dengan konsultasi BJ Habibi pada tahun 1988 pernah mencoba merubah status masyarakat agraris menjadi masyarakat

industrial. Tetapi rancangan besar yang baru berusia dua PELITA itu sudah diterpa krisis moneter tahun 1997.

Pemerintahan Jokowi mempunyai *Trisakti* dan *Trilogi Pembangunan*. Salah satunya ialah *Ekonomi yang mandiri*. Mungkin ekonomi yang mandiri itu sangat ideal yang baru bisa sedikit kelihatan wujudnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tercapai. Oleh karena itu cita-cita itu perlu realistis dengan menerjemahkan “Ekonomi yang mandiri” dalam Nawacitanya sebagai *Ekonomi yang berkeadilan*. Apa artinya berkeadilan? Berkeadilan berarti mengurangi ketimpangan ekonomi antara golongan atas/kaya dan bawah/miskin, dan mempersempit jurang kesempatan berusaha antara golongan kaya dan miskin. Praktisnya angka kemiskinan perlu dikurangi.

Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada tanggal 6 Juni 2017 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah sejak tahun 2015 memusatkan perhatian pada pembangunan *infrastruktur*. Dalam jangka pendek, hal tersebut tidak akan mengurangi angka kemiskinan. Namun, dalam jangka menengah dan panjang pengaruhnya akan sangat berarti (Kompas, Rabu, 7 Juni 2017, hal. 20).

Dengan kata lain pemerintah Jokowi baru bisa sampai beberapa tahun ke depan menyediakan prasarana dasar untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Prasarana itu ialah pelabuhan laut dan udara, dan transportasi massal darat kereta api serta jalan tol, jembatan dan bendungan. Dana yang dibutuhkan Rp 6.000an triliun. Pemerintah Jokowi sadar bahwa APBN tidak mampu mendanai seluruhnya. Oleh karena itu pemerintah sangat membutuhkan uluran tangan swasta dari luar negeri.

Persoalannya ialah dana APBN dan dana swasta asing itu secara langsung akan dinikmati oleh golongan masyarakat ekonomi yang mana? Golongan masyarakat agraris (petani, peternak dan nelayan) atau masyarakat industrial? Semen, besi beton, pipa, aspal, karet, plastik, serat optik, kertas, bank, kendaraan proyek dsb., yang dibutuhkan oleh infrastruktur itu jelas-jelas tidak berkaitan secara langsung dengan golongan masyarakat agraris, melainkan golongan masyarakat industri, baik itu industri korporasi maupun konglomerasi. Korporasi dan konglomerasi itu hanya segelintir berskala nasional dan paling banyak multinasional. Apa yang didapat secara langsung oleh masyarakat agraris yang berjumlah di atas 50 % penduduk Indonesia dari kue pembangunan ekonomi? Ada 43 juta petani. Kalau satu petani memiliki 3-4 anggota keluarga orang saja itu berarti sudah lebih jauh 50 % penduduk Indonesia. Kemiskinan terbesar di masyarakat ada di kalangan petani (Kompas, Senin, 31 Juli 2017, hal. 19). Paling tidak dua hal ini yang dirasakan secara langsung oleh mereka: subsidi pendidikan dan subsidi kesehatan. Subsidi pertanian? Jauh dari harapan mereka.

Jadi benar kata Sri Mulyani bahwa dalam jangka pendek angka kemiskinan tidak akan berkurang, tetap sekitar 10.50 % tapi terang bahwa jurang ketimpangan ekonomi semakin bertambah lebar. Karena uang dalam jumlah beberapa kali lipat APBN itu akan diputar oleh mesin korporasi dan konglomerasi sampai berbunga bercucu kali lipat. Sementara masyarakat agraris harus menunggu beberapa tahun agar komoditi mereka bisa dipasarkan dengan cepat dan dengan harga yang lebih menguntungkan. Itupun kalau mereka tidak dimangsa oleh para importir dan para tengkulak lokal.

Dengan demikian tampak bahwa pemerintah Jokowi mengartikan ekonomi yang berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek ialah masyarakat pertanian perlu ditopang dengan prasarana dasar agar bisa bersaing dalam bidang ekonomi, khusus dengan golongan industrialis lokal dan internasional. Dan pada gilirannya bisa bersaing secara ekonomis dengan negara lain. Dan mayoritas masyarakat ini berada di luar JABODETABEK. Jadi pembangunan yang adil secara khusus berarti pembangunan dari daerah pinggiran, daerah pedalaman, wilayah Timur Indonesia, lebih-lebih dari perbatasan negara. Ini desentralisasi pembangunan. Walaupun ini baru bersifat infrastruktur. Boleh jadi komoditas agraris dimaksudkan oleh Pemerintah Jokowi sebagai bagian dari *struktur* pembangunan, yang diharapkan baru mulai digerakkan dalam pemerintahan periode kedua lima tahun. Komoditas agraris ini akan diperkuat oleh industri agraris dan menjadi batu loncatan menuju transisi masyarakat agraris ke masyarakat industrialis yang baru dimulai pada tahun 2035.

3.2.2. Peran Parlemen

Parlemen juga mempunyai peranan penting dalam mengarahkan karakteristik ekonomi bangsa. Seharusnya parlemen bisa berkolaborasi dengan pihak eksekutif untuk memperlancar transisi ekonomi masyarakat agraris menuju ekonomi industrial. Sayangnya Jokowi selama tahun pertama pemerintahannya hampir tak bisa bersinergi dengan DPR sebagai mitra kekuatan politis. Mayoritas anggota parlemen mencitrakan pemerintahan berbentuk parlementer yang harus dikontrol mutlak oleh mereka. Padahal jelas sekali bahwa pemerintahan negara berbentuk presidensial. Baru di tahun kedua mayoritas suara parlemen bisa digeser bandulnya ke kubu pendukung Jokowi atau Koalisi Indonesia Hebat. Tapi baru lewat setahun menancap gas, Koalisi Merah Putih parlemen sudah mulai mencoba mengerem mobil pemerintahan bahwa mobilnya lagi mengarah ke jurang liberal, kapitalistik, korporatif dan konglomeratif. Ekonomi demokratis umumnya dan ekonomi koperatif khususnya sebagaimana diamanatkan UUD diabaikan oleh Jokowi. Mereka khawatir bahwa liberalisme dan kapitalisme semakin merongrong kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi serta karakter budaya Indonesia.

Kehancuran ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto disebabkan oleh pembiaran IMF mengendalikan ekonomi Indonesia sampai dengan krisis moneter tahun 1997. Utang luar negeri membengkak. Liberalisme dan kapitalisme Eropa dan Amerika serta Jepang mencengkeram hampir semua aset ekonomi Indonesia. Kubu parlemen KMP dengan keras mengingatkan Jokowi untuk tidak masuk lagi ke jurang itu seraya meminta agar tidak menyengsarakan mayoritas rakyat dengan utang luar negeri yang akan dibayar oleh generasi demi generasi karena mengijinkan arus besar modal asing masuk ke Indonesia. Inilah rintangan pertama mereka kepada Jokowi. Kemampuan pemerintah membayar utang luar negeri digeser oleh KMP ke persoalan kemauan pemerintah membayar utang. Mereka ingin menghalang pemerintah agar tidak mau membayar utang dan dengan demikian peringkat itu akan anjlok lagi. Dan ini bisa berujung pada instabilitas politik. Jokowi menanggapi dengan santai bahwa devisa negara kita tahun 2017 ini mencapai nilai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia sebesar 127 miliar dolar US. Sementara sebagian besar investasi yang diajak murni swasta.

Rintangan kedua dari kubu KMP ialah Jokowi agaknya anti Islam. Anti Islam karena membiarkan penghinaan kepada para ulama dan menelantarkan secara ekonomis mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Muslim lantaran mempunyai sistem ekonomi sendiri. Ekonomi syariah itu senafas dengan ekonomi demokratis dan koperasi. Kenapa Jokowi tidak memberi prioritas? Selanjutnya kiblat ekonomi pemerintahan Jokowi mengarah ke pemerintahan Cina. Tidakkah secara tidak langsung pemerintah bisa menggoreskan luka lama Indonesia akan bahaya laten komunis dan semakin memanjakan orang-orang tertentu dalam mencicipi kue ekonomi? Cina secara politik memang menganut aliran komunis. Tetapi secara ekonomi lebih kental kapitalismenya. Jokowi jelas tidak memberi angin kepada komunis karena PKI dilarang di Indonesia (Media Indonesia, Selasa, 19 September 2017, hal. 3). Nampaknya Jokowi beranggapan bahwa memberantas kapitalisme dan liberalisme secara keras sekarang ini bukan cara yang baik dan bijaksana karena sudah menjadi arus deras global. Mayoritas muslim yang adalah masyarakat agraris tetap bisa dibangkitkan secara ekonomis tahap demi tahap untuk memperkuat ekonomi agraris atau bertransisi menuju ekonomi industrialis. Yang penting masyarakat agraris harus disadarkan untuk pemilihan secara bebas ciri ekonomi itu dan masuk dalam persaingan sehat dengan bertolak dari kemampuan sendiri. Salah satu langkah ialah dana antrean haji sebesar hampir Rp. 100 triliun bisa diinvestasikan dengan prinsip kehati-hatian dan beresiko rendah, misalnya di infrastruktur, obligasi pemerintah berskema syariah, bank syariah dan bisnis syariah untuk kesejahteraan umat Muslim yang bersangkutan. (Kompas, Senin, 31 Juli 2017, hal. 20). Usulan ini disetujui MUI.

3.3. PERAN MASYARAKAT

3.3.1. Peran Ormas Muslim

Salah satu Ormas yang begitu aktif membela kepentingan umat Muslim ialah MUI. MUI bisa menjadi salah satu penggerak transisi masyarakat agraris menuju masyarakat industrialis. Ekonomi tidak terlepas dari politik, budaya dan agama. Para ulama di bawah wadah ini sudah mengambil garis tegas bahwa penghinaan kepada para ulama Muslim sudah tidak ada karena kasus Ahok sudah berakhir. Namun persetujuan mereka akan dana antrean haji bukan tanpa imbalan. MUI mengajukan usulan kepada pemerintah agar ekonomi syariah Muslim harus diberi perhatian khusus. Mereka meminta agar 20 % APBN mesti dialokasikan untuk itu.

Dalam *Kongres Ekonomi Umat* yang diselenggarakan oleh MUI pada tanggal 22-24 April 2017 (Kompas, Selasa, 25 April 2017, hal. 1) dibuatlah enam poin rekomendasi kepada Pemerintah yang

dihadiri oleh wakil presiden, Yusuf Kalla. Pertama, sistem ekonomi nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Kedua, akselerasi redistribusi dan optimalisasi sumberdaya alam secara arif dan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi berbasis keunggulan iptek, inovasi dan kewirausahaan. Keempat, pemerintah diharapkan dapat menggerakkan koperasi dan UMKM menjadi pelaku usaha utama ekonomi nasional. Kelima, mewujudkan mitra sejajar usaha besar dengan koperasi, UMKM dalam sistem produksi dan pasar terintegrasi dengan mengutamakan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional, tetap dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI. Dan terakhir, membentuk komite nasional ekonomi umat untuk mengawasi arus baru perekonomian nasional.

Yusuf Kalla menanggapi rekomendasi para pemimpin umat itu dengan menjelaskan bahwa lihatlah masalah umat. Umat tidak mau masuk ke usaha yang baik. Pengusaha harus optimistis dan bekerja keras. Kebijakan pemerintah terkadang sudah berpihak kepada rakyat. Akan tetapi, hal itu tidak dimanfaatkan maksimal dengan semangat berwirausaha. Misalnya, di zaman Orde Baru, hak pengusaha hutan (HPH) awalnya diberikan kepada para pengusaha Muslim. Namun, HPH ini malah dijual karena pemegang HPH lebih suka tinggal di Jakarta. Hal serupa terjadi untuk izin konsesi untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Jadi kelihatan bahwa mental individualistis oknum-oknum menjadi halangan sistem ekonomi syariah. Ketua MUI hampir senada dengan wakil presiden juga mengingatkan para ulama agar redistribusi aset benar-benar diserahkan untuk kegiatan ekonomi aktif. Ormas Islam pun harus bersinergi untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan bersama. Jangan malah aset dikuasai sendiri dan membuat aset kembali dikuasai pengusaha besar.

Oleh karena itu wakil presiden menghimbau agar arus baru ekonomi umat tidak cukup hanya dengan mengadakan kongres. Para ulama mesti mampu mendorong umat untuk memiliki semangat berusaha. Di sisi lain, pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk menumbuhkan ekonomi umat, mulai dari penurunan suku bunga kredit usaha rakyat, redistribusi aset, hingga kemitraan usaha besar dengan usaha mikro kecil dan menengah. Nampak bahwa rekomendasi MUI belum terlalu tegas memilih apakah memperkuat ekonomi agraris atau mendorong umat menuju transisi ekonomi industrialis.

3.3.2. Peran Perguruan Tinggi

Ada sebuah halilintar di siang bolong yang menghantam Perguruan Tinggi di seluruh dunia gara-gara sebuah iklan dari Google dan Ernst & Young yang akan menggaji siapa pun yang bisa bekerja dengannya tanpa harus memiliki ijazah apa pun, termasuk ijazah dari perguruan tinggi (PT). Iklan itu ditanggapi meluas di seluruh dunia melalui media sosial mengenai *universities disruption*. Salah satu artikel yang ramai diperdebatkan ialah artikel *Universities: Disruption is coming* oleh Jim Clifton. Kontennya secara garis besar mempertanyakan dan mengkhawatirkan peran masa depan pendidikan tinggi sebagai penyedia tenaga ahli, hasil riset, dan pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan dunia industri, demikian penjelasan Sudaryono (Kompas, Selasa, 29 Agustus 2017, hal. 6).

Mengutip pendapat Terry Engleton, ia menguraikan bahwa Perguruan Tinggi sedang melakukan bunuh diri massal karena mengabaikan tugas utamanya, yakni pendidikan dan bergeser lebih memprioritaskan riset dan publikasi. Lebih menyedihkan lagi, tradisi hubungan dosen dan mahasiswa, yang sebenarnya berdasarkan relasi guru dan siswa telah bergeser menjadi manager dan pelanggan.

Peringatan ini sangat berguna untuk mendefinisikan ulang peran Perguruan Tinggi dalam perubahan-perubahan alam dan kehidupan manusia di masa depan. Solusinya ialah Perguruan Tinggi harus dibagikan dalam dua kategori. Kelompok pertama adalah PT yang mengutamakan penemuan-penemuan besar untuk perubahan kehidupan manusia. Kelompok PT ini haruslah sangat terbatas dengan subsidi besar. Kelompok kedua ialah PT yang berbasis rakitan, assembling. Tugas utamanya ialah menyuplai sebanyak-banyaknya tenaga ahli perakit yang sangat dibutuhkan oleh industri. Pendidikan seperti itu bisa disebut pendidikan vokasi plus karena cara berpikir yang luas, inter disiplin, dan kompetensi yang dihasilkannya mampu melahirkan produk-produk baru, baik berupa barang maupun jasa.

Bagaimana dengan PT di Indonesia? Tidak sedikit tentunya daftar penemuan-penemuan dari dunia PT Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya dipatenkan. Tetapi apakah itu sudah cukup menggeser ekonomi masyarakat agraris ke masyarakat industri? Penemuan-penemuan itu masih sangat jauh

dari tujuan untuk mengubah secara besar-besaran kehidupan masyarakat, baik itu kualitas masyarakat agraris itu sendiri maupun masyarakat industrial. Segelintir PT negeri, seperti ITB, IPB, UI dan UGM barangkali di masa depan bisa diandalkan sebagai PT kategori pertama. Bagaimana dengan sisa ribuan PT negeri dan swasta lainnya, apakah layak masuk kelompok kedua, PT assembling?

Melihat kondisi riil PT di Indonesia, saya berpendapat bahwa peran PT kelompok assemblinglah yang paling berpeluang untuk secara perlahan-lahan menggeser warna dominan ekonomi masyarakat Indonesia dari agraris ke industrial. Mengharapkan penemuan-penemuan besar di PT itu sangat bergantung pada kualitas SDM. SDM sangat bergantung pada IQ dan IQ sangat bergantung pada asupan gizi. Kalaupun IQ seseorang tinggi ia butuh dana dan prasarana untuk mengaplikasikan pemikirannya. Seberapa besar PT mengalokasikan dananya untuk riset? Berdasarkan laporan internasional mengenai IQ rata-rata negara-negara di dunia, IQ orang Indonesia 86. Ini kalah dari negara-negara tetangga ASEAN yang sudah berada di atas 90. Tingkat IQ 86 itu sama dengan tingkat IQ orang tidak tamat SMA, hanya sampai kelas 2 SMA. IQ 80-89 adalah IQ tingkat bodoh sedangkan IQ 90-109 adalah IQ tingkat normal, yang bisa lanjut ke PT dan tamat PT (Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2003, hal. 172-173).

Para tenaga kerja di dunia industri Indonesia mayoritas tamat SMP dan sedikit sekali tamat SMA keatas. Kita bisa berharap bahwa ledakan generasi muda produktif yang sudah mulai berjalan ini sampai dengan tahun 2035 bisa mengubah peta ekonomi itu. Cara yang terbaik untuk sampai ke situ ialah mau belajar secara bebas dan praktis dari kemajuan ekonomi bangsa lain. Perusahaan-perusahaan multinasional mestinya semakin diberi peluang untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan imbalan alih teknologi industri menengah kepada generasi muda. Pada tahun 2030 sekitar 70 % penduduk Indonesia akan berpadat-padatan tinggal di kota. Urbanisasi adalah salah faktor penentu industrialisasi. Menengok mentalitas umumnya generasi muda Indonesia sekarang ini, sebagian besar mereka tidak berminat tinggal di kampung dengan pola ekonomi agraris. Diperkirakan di pedesaan tinggal 4 % anak muda usia 15-23 yang tertarik pada pertanian. Hampir semua anak muda di desa lebih memilih mengadu nasib di sektor industri, industri UMKM atau sektor informal kota. Mereka menganggap bahwa bertani simbol kemiskinan, keterbelakangan dan kesengsaraan. Bukan hanya itu di sejumlah daerah jumlah petani tua yang berganti mata pencaharian lebih banyak dari jumlah anak muda yang berminat pada pertanian. Alasannya macam-macam: anomali cuaca karena ulah industri, serangan hama, gagal panen, posisi bargaining yang lemah (Kompas, Senin, 18 September 2017, hal. 6). Itu berarti bahwa pada tahun-tahun puncak ledakan generasi muda warna ekonomi sudah bertransisi dari ekonomi agraris ke ekonomi industrialis.

3.3.3. Peran Organisasi Keahlian Ekonomi

Salah satu komponen masyarakat yang menjadi agen perubahan ekonomi adalah organisasi keahlian di bidang ekonomi. Mereka juga juga bisa menjadi sebuah agen besar perubahan ekonomi agraris ke ekonomi industrialis. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, misalnya mencoba mewujudkan harapan Jokowi mengenai ekonomi berkeadilan. ISEI bekerjasama dengan bidang CSR Perusahaan Sinar Mas Asia Pulp and Paper ikut membina 500 desa di lima provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan dana sebesar 10 juta US Dollar selama 5 tahun. 500 desa binaan ini adalah desa-desa agraris. Sudah ada tanda-tanda keberhasilan, contohnya ada petani yang dibina berhasil meningkatkan pendapatannya bila dibandingkan semasa ia menjadi pekerja di pabrik.

Pembinaan ini memang untuk memperkuat ekonomi masyarakat agraris, namun peran ISEI bisa lebih ditingkatkan lagi untuk merambah masyarakat industrial Mikro, Kecil dan Menengah yang bisa membangun rantai ekonomi dengan perusahaan-perusahaan besar. Mereka bisa ikut berkolaborasi dengan CSR Astra Internasional yang sudah mengembangkan 63 kelompok binaan di 26 provinsi.

Lahan lain yang paling berpotensi untuk keterlibatan ISEI ialah ikut serta dalam pembinaan koperasi karena koperasi adalah soko guru perekonomian nasional berdasarkan UUD 45. Koperasi berciri sosial karena menguntungkan anggota, sementara korporasi berciri individual karena menguntungkan pemilik saham. Koperasi di Indonesia ada 209.268. Dari total jumlah, ada 152.482 unit koperasi yang aktif dan 56.786 unit yang tidak aktif. Sumbangsih koperasi bagi perekonomian nasional baru 3,9 %. Bandingkan Perancis dan Belanda, misalnya koperasi menyumbang 18 % perekonomian nasional (Kompas, Kamis, 27 Juli 2017, hal 20). Koperasi memang agak terbelakang karena menghadapi tiga tantangan, yakni ketidakpercayaan masyarakat, keuangan yang tidak sehat

dan pendekatan kebijakan pemerintah yang terlalu berorientasi dari atas ke bawah. Oleh karena itu koperasi harus berinovasi. Misalnya dalam cara pembayaran bisa memakai teknologi finansial.

Satu lagi bidang ekonomi kerakyatan yang mau ditumbuhkan pemerintah ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Subsidi langsung pemerintah pada bidang pertanian memang sangat kecil, tetapi dana desa itu sangat besar, oleh karena itu ISEI bisa menjadi motivator dan fasilitator untuk pertumbuhan BUMDes. BUMDes itu bisa berciri agraris maupun industrial, menurut kondisi masyarakat desa setempat. BUMDes bisa bermitra dengan korporasi nasional dan internasional. BUMDes ini bisa menjadi batu loncatan menuju transisi masyarakat agraris ke masyarakat industrialis.

3.4. PERAN INDIVIDU

Manusia adalah subyek dari pembangunan. Ekonomi baik itu yang berciri agraris maupun industrial tetap merupakan obyek pembangunan. Hanya ada ciri kontras antara masyarakat agraris dan masyarakat industrial dilihat dari sejarah pemunculannya. Masyarakat agraris berciri *sosial*. Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat antar sesama anggota warga desa sehingga seseorang merasa dirinya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempat ia hidup, serta rela berkorban demi masyarakatnya, saling menghormati, serta mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di dalam masyarakat terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama. Jiwa gotong royong sangat kuat. Sebaliknya masyarakat industrial berciri *individual*.

Manusia sebetulnya bukanlah sebuah entitas dengan dimensi tunggal. Masyarakat industrial yang berciri individual harus berjuang keras merealisasikan dirinya dan melengkapkan dirinya dengan dimensi sosial. Mereka bertolak dari sisi internal diri menuju sisi eksternal diri. Sebaliknya masyarakat agraris yang berciri sosial berupaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan dirinya dan melengkapkan dirinya dengan dimensi individual. Mereka bertolak dari sisi eksternal diri menuju sisi internal diri. Masyarakat sosial dan individual bisa hidup berdampingan untuk saling melengkapi. Manusia akan gagal mencapai kesempurnaan dirinya manakala jatuh pada entitas tunggal sosialis atau individualis.

Kebebasan individu dalam masyarakat sosial agraris sangat kurang, sehingga sebuah ciri yang sejajar dengan masyarakat agraris ialah masyarakat *tradisional*. Pola pengelolaan sumber daya ekonomi lahan, peternakan dan perikanan misalnya akan berulang seperti itu karena merupakan pewarisan dari nenek moyang. Kalaupun ada perubahan, itu berskala kecil dan evolutif. Sedangkan kebebasan dalam masyarakat industrial begitu besar sehingga sebuah ciri yang sejajar dengan masyarakat ini ialah masyarakat *liberal*. Diferensiasi pekerjaan yang begitu besar di pabrik-pabrik dalam kota-kota memunculkan ide-ide kreatif baru. Pekerjaan yang lama bisa dengan mudah ditinggalkan orang bila peluang keuntungan ekonomi lebih besar menantinya. Kreativitas-kreativitas produk ekonomi itu bahkan mengubah secara besar-besaran ekonomi masyarakat ke tingkat ketiga, yakni masyarakat ekonomi teknologi informatika. Bahkan sebentar lagi dari mereka akan dilahirkan masyarakat ekonomi revolusi keempat entah apa namanya.

Tetapi sebuah lampu kuning peringatan disampaikan bahwa kalau kebebasan itu bergerak liar dengan tidak mempedulikan lingkungan sosial akan melahirkan individualisme-liberalisme. Contoh klasik dari masyarakat industrial ialah penguasaan aset industri pabrik-pabrik oleh pemilik saham dengan mengambil keuntungan yang sangat besar dari tenaga mayoritas pekerja melahirkan ketimpangan ekonomi yang begitu lebar dan angka kemiskinan yang besar. Kemiskinan yang terparah bukan di pedesaan, melainkan di perkotaan, misalnya Jakarta, Surabaya, dll. Walaupun CSR punya arti dan makna, namun CSR bukanlah solusi yang berbobot untuk mengatasi ketimpangan itu. Semiskin-miskinnya masyarakat agraris mereka masih bisa makan tiga kali sehari dan masih mempunyai rumah sederhana. Sementara masyarakat kota yang miskin jarang makan dan beratap kolong jembatan atau gubuk. Belum lagi kalau para industriawan kapitalis bergandengan tangan dengan revolusi IT menerapkan otomatisasi atau robotisasi dalam perusahaan-perusahaan bahkan di bidang pertanian, maka akan menyebabkan krisis mondial para tenaga kerja. Dengan demikian *etika bisnis* menjadi persoalan akut di masyarakat industrial dan informatika di perkotaan.

Demikian pula sebuah masyarakat agraris sosial yang begitu ketat mengontrol kebebasan individu akan mengarah pada sosialisme. Begitu pula sebuah negara yang begitu cepat mengendalikan ekspresi kebebasan individu akan menuju sosialisme dan totalitarianisme. Masyarakat dan negara semacam ini hanya bisa bertahan kalau mengisolasi diri dari pengaruh dunia luar, lebih-lebih dari pengaruh media sosial internet. Namun kenyataan bahwa revolusi IT sudah merasuk sampai ke

pelosok desa Indonesia. Maka protes-protes kecil bisa mengkristal menjadi sebuah protes besar atas nama HAM. Protes itu akan semakin meningkat manakala para elit politik, militer dan sosial dan ekonomi mengeruk keuntungan ekonomi dengan cara KKN. Maka nasib dan takdir yang dikundangkan oleh para ulama pun bisa jadi tidak mampu membendungnya.

Sejarah pemunculan masyarakat industrial di perkotaan sangat dipengerahi oleh filsafat Yunani dan Agama Kristen. Secara garis besar masyarakat-masyarakat perkotaan ini berlokasi di benua Eropa, Amerika dan Australia. Sementara masyarakat-masyarakat pedesaan yang berciri agraris berlokasi di benua Asia dan Afrika yang dipengaruhi oleh filsafat dan agama Hindu, Budha dan Muslim serta animisme dan dinamisme. Mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim. Minoritas Hindu dan Kristen yang berada di luar pulau Jawa masih dilatarbelakangi oleh animisme dan dinamisme sebagai kebudayaan. Pertanyaan besar ialah maukah dengan bebas para petani, nelayan dan peternak yang berlatar belakang Muslim dan Kristen-Hindu yang dipengaruhi animisme dan dinamisme ini mengadopsi mentalitas individual untuk bertransisi ke masyarakat industrial? Maukah mereka berasimilasi dengan sistem ekonomi industrial? Atau bisakah mereka berakulturasi secara bebas dengan budaya industrial ini dengan mengambil unsur-unsur positif pengelolaan ekonomi industrial sambil dengan serius menyisihkan unsur-unsur negatifnya? Atau menolak samasekali ekonomi industrial?

Kemungkinan ketiga sudah pasti sulit dipilih. Tinggal kemungkinan satu dan dua. Segi-segi yang mau diakulturasi dan diasimilasi oleh masyarakat agraris terhadap masyarakat industrialias secara bebas ialah kepadatan penduduk. Urbanisasi mengakibatkan hidup berdesak-desakan. Kalau keluarga agraris mempunyai anak 4-4 orang, penduduk kota hanya mempunyai anak 2-3. Mereka juga hidup hanya dalam relasi keluarga inti, sementara masyarakat pedesaan dengan keluarga besar. Pekerja kota butuh rumah yang layak, yang hampir tak punya halaman rumah. Sedangkan penduduk desa punya rumah layak dengan halaman yang cukup luas. Tingkat polusi udara dan air cukup tinggi. Sebaliknya di desa hampir tidak ditemukan polusi udara dan air. Kedua ialah anonimitas. Masyarakat industrialis kota cenderung membangun relasi impersonal. Mereka lebih menekankan fungsi dengan pertimbangan rasional dan logis. Ketiga ialah mobilitas. Para pekerja bergerak terus, berjalan terus, bicara, bermain tetapi sangat jarang berani berhenti sejenak, jarang berani menghadapi dirinya sendiri. Disiplin waktu adalah hal begitu penting untuk membagi mobilitas pekerjaan. Ketiga ialah pragmatisme. Orang kota mendekati masalah sebagai masalah itu saja, masalah lain diselesaikan saat berikutnya. Baginya hidup adalah serangkaian masalah. Keempat ialah universalitas. Banjirnya orang desa ke kota membentuk ikatan kultur baru yang menembus ikatan batas-batas primordial suku, ras, agama, maupun profesi. Kelima ialah profanitas. Hal yang sakral harus dipisahkan dari hal yang rohani (I Bambang Sugiharto & Agus Rachmat W, *Wajah Baru Etika & AGAMA*, Kanisius: Yogyakarta, 2000, hal. 225-229). Kesalahan berakulturasi dan berasimilasi secara positif dengan dilandasi nilai etis dan spiritual agama dari masyarakat agraris yang bertransisi ke masyarakat industrialis itu akan menjerumuskan mereka pada individualis dengan akibat-akibat negatifnya ialah anti sosial, hilangnya kedirian dan kemanusiaan. Orang merasa kesepian dalam keramaian. Orang mengalami neurotik karena selalu terburu-buru dikejar sesuatu yang tak pernah jelas. Akibatnya ialah terjerat dalam narkoba. Kriminalitas tinggi. Dan akhirnya hilangnya unsur misteri dalam hidup.

Indonesia berkemungkinan besar akan bertransisi dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial secara akulturatif pada puncak ledakan penduduk produktif usia muda di tahun 2035. Lahan-lahan agraris hari demi hari dikonversi menjadi lokasi industri baru atau relokasi karena perhitungan UMR yang lebih murah. Di mana ada pabrik baru di situ ada kompleks perumahan baru, perkantoran dan pusat perbelanjaan untuk para pekerja. Satu faktor penentu yang akan mengarahkan transisi itu ialah SDM. Pendidikan memegang peranan penting. Ini menyangkut kualitas manusia. Indeks Prestasi Manusia (IPM) mesti ditingkatkan. Paling tidak pada tahun itu sebagian besar anak muda sudah tamat Sarjana Strata 1 berciri vokasi plus. Produk-produk Koperasi, UMKM, bank syariah dan BUMDes syariah sudah bisa menjadi warna ekonomi sebagai usaha mandiri oleh pengusaha muda. Dan lebih baik industri-industri mikro, kecil dan menengah ini memperkuat ekonomi agraris atau mengelola hasil agraris sehingga mendapat nilai tambah. Infrastruktur telekomunikasi bisa bergandengan tangan dengan industri-industri itu, seperti yang mulai diupayakan oleh KOMINFO untuk menasar 1 juta petani dan nelayan go digital memperdagangkan hasil agraris melalui ribuah startup. Target pemerintah ialah bahwa pada tahun 2020 e-commerce menyumbang Rp. 1.700. triliun (Kompas.com, 11/09/2017). Pemanfaatan mediasoal yang cenderung demi kesenangan, game dan ujaran kebencian, saya yakin sudah bisa disingkirkan oleh generasi itu. Bisa juga industri-industri bermitra dengan korporasi nasional dan internasional. Kalau itu berjalan baik, maka ini menjadi peluang untuk mengubah BUMN-BUMN berciri syariah penuh. Indonesia ke depan tidak bisa lagi menjadi tempat pemasaran saja komoditas pertanian dan produk-produk kecil dan menengah

industri. Tidak juga menjadi tempat murah tenaga kerja karena kuantitas SDM nomor empat di dunia. Indonesia bisa menjadi negara yang berperan besar dalam pencatatan ekonomi, budaya, politik dan religius dunia pada tahun-tahun itu.

4. SIMPULAN

Masyarakat adalah himpunan dari individu-individu. Individu-individu itu saling berinteraksi karena salah satu alasannya mempunyai orientasi ekonomi yang sama. Untuk sementara waktu orientasi ekonomi masyarakat Indonesia umumnya berciri agraris. Namun suatu dinamika sedang berlangsung menuju masyarakat industrial. Tanda-tanda ke arah itu ialah Industri-industri nasional dan internasional yang berpusat di kota perlahan-lahan mulai memperkecil luas lahan pertanian. Industri-industri membutuhkan tenaga kerja. Dan para pekerja membutuhkan rumah, maka lahan pertanian semakin dikurangi lagi. Para petani tua yang hidup di desa juga mulai beralih profesi karena lahan sempit, anomali cuaca, gagal panen, serangan hama dan daya tawar lemah atas hasil panen. Regenerasi petani pun mandeg karena 90an % anak muda usia produktif 15-23 tahun lebih tertarik mengadu nasib di kota. Pada tahun 2030 70 % penduduk Indonesia memadati kota-kota. Maka transisi masyarakat agraris menuju masyarakat industrialis akan terjadi pada sekitar tahun itu, tahun ledakan penduduk usia produktif Indonesia.

Transisi itu perlu didukung secara optimis, karena keputusan individu-individu yang bebas memilih pekerjaanlah yang harus dihargai. Pemerintah, Ormas Agama, Perguruan Tinggi dan Organisasi keahlian bolehlah berperan memberi ruang-ruang konsultasi untuk membantu individu-individu mengambil keputusan. Pihak-pihak ini boleh saja memberi pertimbangan untung ruginya individu memilih berkomunitas di masyarakat agraris atau beralih ke komunitas industrial karena segi material mata pencaharian akan bersinggungan secara langsung dengan cara berpikir dan berperasaan, relasi sosial, politis, tingkah laku etis, kultural dan spiritual. Manusia itu adalah individu (tak terbagi) dalam keunikan, namun sekaligus terbagi dalam aspek-aspek dirinya demi pertumbuhan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2003.
2. Sugiharto, Bambang I & Agus Rachmat W., *Wajah Baru Etika & Agama*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.